

Nama: Tazki Alfikri

NPM: 2313031028

Kelas: 2023A

MK: Ekonomi Pendidikan

UAS

Jawaban Soal UAS

No. 1

1. Dari segi efisiensi internal, penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut belum maksimal karena sebagian besar dana hanya difokuskan pada pembangunan gedung sekolah. Padahal, pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan media pembelajaran juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Akibatnya, meskipun jumlah siswa yang bersekolah meningkat, hasil belajar mereka tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dari segi efisiensi eksternal, kebijakan tersebut juga belum optimal karena pendidikan yang diberikan belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya peningkatan kualitas hasil belajar siswa sehingga manfaat pendidikan bagi masyarakat dan pembangunan juga belum tercapai secara optimal.
2. Dampak dari kebijakannya membuat sumber daya manusia menjadi kurang berkualitas. Hal ini disebabkan guru di sekolah tersebut tidak mendapatkan pelatihan yang memadai sehingga berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Meskipun pembangunan sekolah dapat meningkatkan akses pendidikan, kualitas pembelajaran belum tentu meningkat apabila kompetensi guru tidak ikut dikembangkan. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih baik adalah tetap melakukan pembangunan sekolah, tetapi juga memastikan bahwa guru telah mendapatkan pelatihan dan memahami cara mengajar siswa dengan baik. Pengalokasian dana pendidikan tidak hanya berdampak pada guru, tetapi juga pada kualitas hasil belajar siswa. Jika kualitas pembelajaran rendah, maka kemampuan dan keterampilan siswa juga tidak berkembang secara optimal, yang pada akhirnya dapat memengaruhi masa depan mereka. Dengan demikian, anggaran pendidikan sebaiknya digunakan secara

seimbang antara pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

No. 2

1. Bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut terlihat dari perbedaan fasilitas sarana dan prasarana, akses teknologi, serta kualitas tenaga pendidik antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium yang lengkap, akses internet yang cepat, dan guru yang profesional, sedangkan sekolah di daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan fasilitas, teknologi, dan jumlah guru. Salah satu penyebabnya adalah lokasi sekolah yang berada di daerah pelosok sehingga distribusi fasilitas pendidikan menjadi lebih sulit karena kondisi geografis, akses jalan yang kurang memadai, serta biaya distribusi yang lebih besar. Akibatnya, kesempatan siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas menjadi tidak merata dan berdampak pada perbedaan hasil belajar antara siswa di perkotaan dan pedesaan.
2. Secara ekonomi, ketimpangan pendidikan dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Sekolah yang memiliki fasilitas dan kualitas pembelajaran yang kurang memadai cenderung menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang lebih rendah dibandingkan sekolah yang memiliki fasilitas lengkap. Jika dianalisis dari sudut pandang ekonomi, kondisi ini dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan risiko pengangguran di masa depan. Padahal, pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, bahkan menjadi pengusaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan aktif dalam pemerataan pembangunan pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Selama ini pembangunan sering kali lebih terpusat di wilayah perkotaan sehingga sekolah-sekolah di daerah pelosok masih tertinggal. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, memperluas akses internet, menambah jumlah guru yang berkualitas, serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan

pendidikan di daerah terpencil agar kesenjangan pendidikan dapat dikurangi dan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih merata.

No. 3

1. Menurut teori human capital, pendidikan merupakan investasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas seseorang agar memiliki nilai yang lebih tinggi di pasar kerja. Namun, pada kasus tersebut jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat, tetapi kompetensi yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Akibatnya, banyak lulusan yang menganggur atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi pendidikan yang telah dilakukan belum mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Selain itu, kurangnya pengalaman kerja, keterampilan praktis, serta penguasaan teknologi juga dapat menjadi penyebab terjadinya pengangguran terdidik. Dengan demikian, masalah utama dalam kasus tersebut bukan terletak pada jumlah lulusan, melainkan pada ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang sangat erat karena pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dalam kasus tersebut, hubungan antara pendidikan dan pasar kerja belum berjalan secara optimal karena kompetensi yang diperoleh lulusan di perguruan tinggi tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, banyak lulusan yang kesulitan memperoleh pekerjaan atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya. Kondisi ini dapat menimbulkan pengangguran terdidik dan mengurangi efektivitas pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara perguruan tinggi dan dunia industri dalam penyusunan kurikulum, penyediaan program magang, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja. Dengan demikian, lulusan akan memiliki kemampuan yang

lebih relevan, mudah terserap di dunia kerja, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

No. 4

1. Kasus kenaikan uang kuliah dapat dianalisis melalui konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat. Sebagai barang publik, pendidikan memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang memperoleh pendidikan, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pendidikan juga memiliki sifat barang privat karena individu yang menempuh pendidikan memperoleh manfaat langsung, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, peluang kerja, dan pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, universitas menaikkan biaya kuliah untuk meningkatkan fasilitas dan layanan akademik sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Akan tetapi, jika kenaikan biaya terlalu tinggi, akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi terbatas sehingga fungsi pendidikan sebagai sarana pemerataan kesempatan menjadi berkurang.
2. Kenaikan biaya pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, kebijakan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu mungkin mengalami kesulitan dalam membayar biaya kuliah sehingga berisiko menunda, bahkan menghentikan pendidikannya. Dari sisi ekonomi, kenaikan biaya pendidikan dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat peningkatan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya, mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lebih terbatas.

3. Menurut saya, pemerintah perlu melakukan intervensi karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Jika biaya pendidikan terus meningkat tanpa adanya bantuan atau pengawasan, maka masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, subsidi biaya kuliah, maupun pengawasan terhadap kebijakan kenaikan biaya pendidikan agar tetap terjangkau. Dengan adanya intervensi tersebut, kesempatan memperoleh pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat secara lebih merata dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

No. 5

1. Masalah pada kasus tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost. Biaya pendidikan tidak hanya mencakup uang sekolah, tetapi juga biaya lain yang harus dikeluarkan siswa untuk menunjang proses pembelajaran, seperti pembelian perangkat elektronik, kuota internet, dan akses teknologi lainnya. Bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, biaya tersebut menjadi beban tambahan yang cukup besar. Selain itu, terdapat opportunity cost atau biaya peluang yang harus ditanggung oleh siswa dan keluarganya. Misalnya, uang yang digunakan untuk membeli perangkat dan kuota internet sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Akibatnya, sebagian siswa mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran digital sehingga partisipasi belajar mereka menurun.
2. Kesenjangan digital dapat menyebabkan perbedaan kesempatan belajar antar siswa. Siswa yang memiliki perangkat dan akses internet yang memadai akan lebih mudah mengikuti pembelajaran, mengakses materi, serta mengembangkan keterampilannya. Sebaliknya, siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu akan mengalami hambatan dalam mengikuti proses

pembelajaran sehingga berisiko tertinggal dibandingkan teman-temannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hasil belajar, memperlebar kesenjangan pendidikan, dan memengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Jika terus berlangsung, kesenjangan digital juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan akses teknologi pendidikan bagi seluruh siswa. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain memberikan bantuan perangkat pembelajaran bagi siswa kurang mampu, menyediakan subsidi atau bantuan kuota internet, serta memperluas jaringan internet hingga ke daerah terpencil. Selain itu, sekolah dapat menyediakan fasilitas laboratorium komputer atau pusat belajar digital yang dapat dimanfaatkan siswa secara gratis. Dengan adanya dukungan tersebut, seluruh siswa memiliki kesempatan yang lebih setara dalam mengikuti pembelajaran berbasis digital sehingga kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan dapat meningkat.